

Pandemi covid 19 di tahun 2021 telah menyebabkan banyak perubahan dan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Untuk menanggulangnya, pemerintah Indonesia mulai gencar mengimplementasikan kebijakan penanggulangan covid 19 baik dalam bentuk pembatasan sosial, vaksinasi, pemberian bantuan secara tunai/non tunai, dan banyak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan melihat peranan masyarakat Banjar Adat dalam implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19 di Bali pada tahun 2021. Pandemi COVID-19 telah memengaruhi hampir semua sektor di seluruh dunia, namun Provinsi Bali kala itu menunjukkan keunikan dengan tingkat kepatuhan masyarakatnya yang sangat tinggi (96 persen pada tahun 2021) dalam menaati kebijakan-kebijakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan teori implementasi oleh Merilee Grindle sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis peran masyarakat banjar adat dari segi konten (isi kebijakan) dan konteks kebijakan (lokasi kebijakan diimplementasikan). Lebih lanjut, penelitian ini sekaligus diharapkan mampu berkontribusi untuk membuka ruang diskusi kedepannya terkait dengan penyempurnaan *framework* dari Merilee Grindle, dengan mengangkat bahasan tentang eksistensi aspek-aspek informal (keberadaan masyarakat dan nilai-nilai adat) dalam suatu tatanan sosial terkait dengan agenda implementasi kebijakan publik yang mana belum menjadi fokus perhatian Grindle dalam frameworknya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif komparatif dengan cara membandingkan peran masyarakat banjar adat di dua lokasi yang berbeda yakni di Banjar Adat tegal Dukuh Anyar (Kota Denpasar) dan Banjar Adat Taman Merthanadi (Kabupaten Badung) untuk nantinya hasil penelitian yang ditemukan (baik persamaan maupun perbedaan) akan digunakan dalam penarikan kesimpulan. Adapun pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara secara semi terstruktur serta melakukan tinjauan pustaka sebagai sumber data sekunder

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Banjar Adat memiliki peran yang signifikan dalam menyukseskan agenda implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19 di Bali. Meskipun terdapat beberapa perbedaan peran masyarakat antara kedua banjar (berdasarkan faktor-faktor tertentu), namun secara umum bentuk pengorganisasian Banjar Adat sebagai institusi sosial yang *flexible* dan berbasis kekeluargaan secara turun temurun telah mampu menciptakan rasa saling memiliki antar sesama, hingga dapat menghasilkan tingkat partisipasi yang tinggi di antara masyarakat. Kesamaan latar belakang adat, sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal yang masih kuat di kalangan masyarakat banjar adat juga menjadi faktor pendukung partisipasi masyarakat banjar adat dalam perannya mendukung implementasi kebijakan penanggulangan covid 19 tahun 2021. Selain itu, adanya kolaborasi antara aktor pemerintah dan satuan adat dalam suatu tatanan sosial juga menjadi keunikan tersendiri sekaligus poin penting yang mampu meningkatkan peran masyarakat banjar adat dalam menyukseskan agenda implementasi kebijakan covid 19 tahun 2021

Kata Kunci: Peran Masyarakat, Banjar Adat, Implementasi Kebijakan, Merilee Grindle, Kebijakan Penanggulangan covid 19.

### Abstract

Covid 19 pandemic in 2021 has caused many changes and negative impacts on the world societies. Due to this situation, government of Indonesian has begun to intensively implement policies for dealing with Covid-19 in the form of social restrictions, vaccinations, providing cash/non-cash assistance, and many other policies. This research aims to explore and see the role of the Banjar Adat community in implementing the COVID-19 response policy in Bali 2021. The COVID-19 pandemic has affected almost all sectors throughout the world, but turns out Bali at that time showed uniqueness with its high level community's compliance (96 percent in 2021). Furthermore, this research uses implementation theory by Merilee Grindle as a conceptual framework to analyze the role of banjar adat communities in terms of policy content and policy context (where the policy is implemented). Furthermore, it is also hoped that this research will be able to contribute to opening up space for future discussion regarding the refinement of Merilee Grindle's framework, by raising discussions about the existence of informal aspects (the existence of communities and traditional values) in a social order, especially on the public policy implementation agenda which has not been the focus of Grindle's attention in the framework used. The research method used is a comparative qualitative approach by comparing the role of banjar adat communities in two different locations, namely in Banjar Adat Tegal Dukuh Anyar (Denpasar City) and Banjar Adat Taman Merthanadi (Badung Regency) for later existing research results (both similarities and differences), will be used for taking conclusions. Data collection was carried out by conducting semi-structured interviews and conducting a literature review as a secondary data source

The results of this research show that the Banjar Adat community has a significant role in the success of policy implementation agenda for dealing with COVID-19 in Bali. Even though there are some differences in the role of the community between two banjars (based on certain factors), in general, Banjar Adat as a flexible and family-based social institution has for generations been able to create a sense of mutual belonging among each other, resulting in a higher level of participation high among the people. The similarity of traditional, social, cultural and local values that are still strong among the Banjar Adat community is also a supporting factor for the participation of the Banjar adat community in their role to supporting the implementation of the Covid 19 response policy in 2021. Collaboration between government actors and traditional units in a social order are also unique in their own right as well as important points that can increase the role of banjar adat communities in the success of the 2021 Covid 19 policy implementation agenda.

**Keywords:** Community Role, Banjar Adat, Policy Implementation, Merilee Grindle, Covid 19 Management Policy.